



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Jln. Cut Nyak Dien Telp. (0761) 21172, 28997, 33073 Fax. (0761) 21172, 22513, 28997
E-mail : bkd@riau.go.id Website : http://bkd.riau.go.id
PEKANBARU - RIAU

Kode Pos 28126

Pekanbaru, 22 November 2016

| | | | |
|----------|--|------|--|
| Nomor | : 800/BKP2D/3.2/XI/2016/3733 | Yth. | Kepada Sdr.BUPATI/WALIKOTA |
| Sifat | : Penting | | c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau |
| Lampiran | : 1 (satu) berkas | | di- |
| Hal | : Proses Kenaikan Pangkat : PNS Periode April 2017 Terkait Pelimpahan Personel | | Tempat |

Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, untuk proses kenaikan pangkat periode April 2017 bagi PNS yang terkait pengalihan personil, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau menginventarisir PNS terkait pengalihan personil, yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya untuk periode April 2017;
2. BKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau agar dapat menginformasikan kepada seluruh PNS yang dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Riau ataupun sebaliknya, untuk dapat melaksanakan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2016 dan Penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) periode Penilaian Januari s/d Desember 2016;
3. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Formulir Sasaran Kerja terdiri atas 2 (dua) periode yaitu Januari s/d September 2016 yang ditetapkan pada bulan Januari 2016 serta periode Oktober s/d Desember 2016 yang ditetapkan pada bulan Oktober 2016;
 - b. Penilaian Capaian Sasaran Kerja terdiri atas 2 (dua) periode yaitu Januari s/d September 2016 yang ditetapkan pada bulan September 2016 serta periode Oktober s/d Desember 2016 yang ditetapkan pada bulan Desember 2016;
 - c. Penilaian Prestasi Kerja yang ditetapkan pada bulan Desember 2016;
 - d. Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai yang tertera pada Formulir Sasaran Kerja, Penilaian Capaian Sasaran Kerja, dan Penilaian Prestasi Kerja dijelaskan secara lebih rinci pada lampiran surat ini;
 - e. Formulir Sasaran Kerja, Penilaian Capaian Sasaran Kerja, dan Penilaian Prestasi Kerja yang telah disusun dibuat rangkap 3 (tiga), dengan rincian 2 (dua) rangkap diteruskan kepada Dinas yang terkait urusan pengalihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas terkait/BKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Penetapan Penilaian Prestasi Kerja **paling lambat sampai dengan 23 Desember 2016** sedangkan 1 (satu) rangkap dikembalikan kepada PNS yang bersangkutan.

4. Penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) periode Penilaian Januari s/d Desember 2016 sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) diserahkan oleh PNS yang bersangkutan kepada Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota **paling lambat sampai dengan 16 Desember 2016**, untuk dapat dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Penilaian DUPAK oleh Tim Penilai Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan sampai tahap penerbitan Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK)/Tabulasi Penilaian Angka Kredit yang didalamnya tertera rekomendasi Tim Penilai apakah dapat/belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat;
 - c. Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK)/Tabulasi Penilaian Angka Kredit dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai, dengan rincian 2 (dua) rangkap diteruskan kepada Dinas yang terkait urusan pengalihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk pelaksanaan Penetapan Angka Kredit **paling lambat sampai dengan 30 Desember 2016** sedangkan 1 (satu) rangkap dikembalikan kepada PNS yang bersangkutan;
 - d. Untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Tim Penilai bagi Jabatan Fungsional Tertentu terkait urusan pengalihan, maka pelaksanaan penilaian DUPAK s/d Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dimana pengajuan DUPAK kepada Dinas yang terkait urusan pengalihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau difasilitasi oleh Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. PNS terkait pengalihan personil yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat pilihan (fungsional tertentu), dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan;
 - c. Periode Penilaian Angka Kredit sampai dengan Desember 2016 dan telah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat (tertera pada Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK)/Tabulasi Penilaian Angka Kredit);
 - d. Telah memenuhi nilai minimal butir kegiatan pengembangan profesi dan/atau pengembangan diri, bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk kenaikan jabatan dan pangkat;
 - e. Telah lulus Diklat/Sertifikasi Fungsional bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk pengangkatan pertama dalam jabatan;
 - f. Telah lulus Diklat/Sertifikasi Penjurusan Fungsional bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk kenaikan jabatan dan pangkat;
 - g. Untuk kenaikan pangkat yang disertai dengan kenaikan jabatan, maka kenaikan jabatannya harus ditetapkan terlebih dahulu.
6. PNS terkait pengalihan personil yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat reguler (fungsional umum), dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik.

7. Berkas usulan kenaikan pangkat disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota **paling lambat sampai dengan 06 Januari 2017**, untuk pelaksanaan proses entry usulan kenaikan pangkat oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota;
8. Berkas usulan kenaikan pangkat yang telah di entry oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, diserahkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Riau **paling lambat sampai dengan 20 Januari 2017**, untuk pelaksanaan penetapan Nota Usul Kenaikan Pangkat dan Surat Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat;
9. Hal-hal lain yang masih perlu dikonsultasikan dapat disampaikan kepada Bidang Mutasi c.q. Sub Bidang Kepangkatan Jabatan dan Non Jabatan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau, dengan kontak person **Kabid Mutasi BKP2D – Hp. 081275896667** atau sdr. **Indra – Hp. 085265950885**;
10. Usul kenaikan pangkat yang melampaui tanggal sebagaimana dimaksud pada butir 7 (tujuh) dan berkas tidak lengkap, **tidak akan diproses** dan akan dikembalikan kepada PNS yang bersangkutan melalui BKD Kabupaten/Kota masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU,**



Drs. ASRIZAL, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 198702 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Inspektur Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau di Pekanbaru;
6. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau di Pekanbaru;
7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau di Pekanbaru.

Lampiran I

Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

Nomor : 800/BKP2D/3.2/XI/2016/3733

Tanggal : 22 November 2016

**BATAS WAKTU DAN SYARAT ADMINISTRASI
USULAN KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 APRIL 2017
BAGI PNS DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA YANG DIALIHKAN
KE PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

1. BATAS WAKTU PENYERAHAN BERKAS USULAN KENAIKAN PANGKAT DARI PNS YANG BERSANGKUTAN KEPADA BKD KABUPATEN KOTA SE-PROVINSI RIAU ADALAH TANGGAL 06 JANUARI 2017.

Penyerahan kelengkapan administrasi mohon dilaksanakan segera sesuai batas waktu yang telah ditentukan, mengingat proses kenaikan pangkat harus berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, yakni Kanreg XII BKN, BKN Pusat dan Sekretariat Negara. Bagi yang melampaui tanggal yang ditentukan dan berkas tidak lengkap, tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada PNS yang bersangkutan.

2. SYARAT ADMINISTRATIF

2.1. Untuk kenaikan pangkat reguler melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Formulir Usulan Kenaikan Pangkat;
- b. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
- c. Fotocopy sah SK CPNS (80%);
- d. Fotocopy sah SK PNS (100%);
- e. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
- f. Fotocopy sah SKP tahun 2015 dan tahun 2016;
- g. Fotocopy sah SK Pembebasan dari jabatan fungsional bagi yang PNS yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT);
- h. Fotocopy sah surat keterangan ijin belajar/tugas belajar jika mencantumkan ijazah baru;
- i. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- j. Print out forlap.dikti.go.id telah berstatus lulus jika mencantumkan ijazah baru;
- k. Fotocopy sah akreditasi program studi jika mencantumkan ijazah baru;
- l. Fotocopy sah surat penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;
- m. Fotocopy sah SK Mutasi bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Kabupaten/Kota atau mutasi unit kerja;
- n. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif harus melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau KOPERTIS bahwa ijazah atas nama PNS yang diusulkan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Untuk kenaikan pangkat pilihan (karena menduduki jabatan struktural) melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Formulir Usulan Kenaikan Pangkat;
- b. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
- c. Fotocopy sah SK CPNS (80%);
- d. Fotocopy sah SK PNS (100%);
- e. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
- f. Fotocopy SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan (SK pelantikan yang dilampirkan adalah SK pelantikan sejak keluar pangkat terakhir sampai dengan SK pelantikan terakhir);
- g. Fotocopy sah SKP tahun 2015 dan tahun 2016;
- h. Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk.II / Sertifikat DIKLATPIM III / Ijazah S2 bagi yang akan pindah golongan ke IV/a;
- i. Fotocopy sah SK Pembebasan dari jabatan fungsional bagi yang PNS yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT);

- j. Fotocopy sah surat keterangan ijin belajar/tugas belajar jika mencantumkan ijazah baru;
- k. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- l. Print out forlap.dikti.go.id telah berstatus lulus jika mencantumkan ijazah baru;
- m. Fotocopy sah akreditasi program studi jika mencantumkan ijazah baru;
- n. Fotocopy sah surat penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;
- o. Fotocopy sah SK Mutasi bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Kabupaten/Kota atau mutasi unit kerja;
- p. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif harus melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau KOPERTIS bahwa ijazah atas nama PNS yang diusulkan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Bagi yang akan naik pangkat pilihan (karena menduduki jabatan fungsional) melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Formulir Usulan Kenaikan Pangkat;
- b. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
- c. Fotocopy sah SK CPNS (80%);
- d. Fotocopy sah SK PNS (100%);
- e. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
- f. Asli SKP tahun 2015 dan tahun 2016;
- g. Fotocopy sah SK Pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi kenaikan pangkat pertama kali;
- h. Fotocopy sah sertifikat Diklat Dasar sesuai jenjang jabatan fungsional jika dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- i. Fotocopy sah SK Kenaikan dalam jabatan fungsional bagi yang kenaikan pangkatnya disertai kenaikan dalam jabatan (JFT);
- j. Fotocopy sah sertifikat Diklat/Sertifikasi kenaikan jabatan sesuai jenjang jabatan fungsional jika dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- k. Fotocopy sah SK Pembebasan dari jabatan fungsional bagi PNS Fungsional yang tidak mampu mengumpulkan angka kredit lebih dari 5 (tahun) atau karena alasan lain yang ditentukan;
- l. Fotocopy sah SK Pengangkatan kembali bagi PNS Fungsional yang sebelumnya dibebaskan sementara;
- m. Asli Penetapan Angka Kredit per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT serta fotocopy sah Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur Penilaian DUPAK.
- n. Fotocopy sah surat keterangan ijin belajar/tugas belajar jika mencantumkan ijazah baru;
- o. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- p. Print out forlap.dikti.go.id telah berstatus lulus jika mencantumkan ijazah baru;
- q. Fotocopy sah akreditasi program studi jika mencantumkan ijazah baru;
- r. Fotocopy sah surat penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;
- s. Fotocopy sah SK Mutasi bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Kabupaten/Kota atau mutasi unit kerja;
- t. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT contohnya bukti fisik pengembangan profesi, fotocopy sah sertifikat pendidikan dan pelatihan, SK *Inpasing* nama jabatan dll;
- u. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif harus melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau KOPERTIS bahwa ijazah atas nama PNS yang diusulkan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KETENTUAN LAIN

- a. Proses entry usulan pada SAPK BKN dilaksanakan oleh BKD Kabupaten/Kota, dimana kenaikan pangkat reguler dan non reguler agar dibedakan nomor usulnya;
- b. Semua berkas dibuat dalam:
 - rangkap 5 (lima) bagi yang naik ke golongan IV/c, IV/d dan IV/e.
 - rangkap 2 (dua) bagi golongan IV/b kebawah;
- c. Berkas usulan harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Berkas usulan disusun sesuai urutan kelengkapan berkas pada lampiran surat edaran ini;

- e. ASLI PAK dimasukkan kedalam berkas yang sama dan diberi tanda;
- f. Untuk PNS yang atasan langsungnya sekarang berbeda dengan yang tertera pada SKP, harus melampirkan SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan atasan langsung saat ini;
- g. PNS yang naik pangkat pilihan dalam jabatan fungsional tertentu disertai dengan kenaikan jabatan fungsionalnya, maka wajib melampirkan fotocopy SK fungsional terbaru;
- h. Bagi PNS yang pernah memperoleh peninjauan masa kerja agar melampirkan surat keputusannya;
- i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, ringan dan berat pada 4 (empat) tahun terakhir supaya melampirkan SK penjatuhan hukuman disiplin;
- j. Bagi yang berkas usulnya tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan dari ketentuan diatas maka usul kenaikan pangkatnya tidak dapat diproses lebih lanjut.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU,**



Drs. ASRIZAL, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 198702 1 001

Lampiran II

Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

Nomor : 800/BKP2D/3.2/XI/2016/3733

Tanggal : 22 November 2016

**PENANDATANGANAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP), PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
PNS DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA YANG DIALIHKAN KE PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

| NO | JABATAN | JENIS DOKUMEN | PERIODE PENILAIAN | TANGGAL PENETAPAN | PENANDATANGAN | KET |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--------------|
| 1 | Guru | Formulir SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | Januari 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Sekolah | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Oktober 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Sekolah | |
| | | Penilaian Capaian SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | September 2016 | - Pejabat Penilai : Kepala Sekolah | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 | - Pejabat Penilai : Kepala Sekolah | |
| | | Penilaian Prestasi Kerja | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 & Januari 2017 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Sekolah - Atasan Pejabat Penilai : Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau | |
| | | 2 | Fungsional umum pada SMA/SMK | Formulir SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | |
| Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Oktober 2016 | | | | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Sekolah | |
| Penilaian Capaian SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | | | September 2016 | - Pejabat Penilai : Kepala Sekolah | |
| | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | | | Desember 2016 | - Pejabat Penilai : Kepala Sekolah | |
| Penilaian Prestasi Kerja | Januari 2016 s/d Desember 2016 | | | Desember 2016 & Januari 2017 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Sekolah - Atasan Pejabat Penilai : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau | |
| 3 | Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah | | | Formulir SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | Januari 2016 |
| | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Oktober 2016 | | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau | |
| | | Penilaian Capaian SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | September 2016 | - Pejabat Penilai : Es.II yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 | - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau | |
| | | Penilaian Prestasi Kerja | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 & Januari 2017 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau - Atasan Pejabat Penilai : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau | |

| NO | JABATAN | JENIS DOKUMEN | PERIODE PENILAIAN | TANGGAL PENETAPAN | PENANDATANGAN | KET |
|--------------------------|--|------------------------------|--|-------------------|---|---|
| 4 | Pengawas Ketenagakerjaan | Formulir SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | Januari 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota | Jika terjadi perubahan PERDA SOTK di Kabupaten/Kota yang berdampak pada tidak adanya lagi Es.IV atau Es.III yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan di lingkungan Kabupaten/Kota maka penanda tangan Formulir SKP dan Penilaian Capaian SKP periode Oktober 2016 s/d Desember 2016 dilaksanakan oleh Es.IV dan Es.III yang membidangi di Provinsi Riau |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Oktober 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | Penilaian Capaian SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | September 2016 | - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 | - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota | |
| Penilaian Prestasi Kerja | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 & Januari 2017 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota - Alasan Pejabat Penilai : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau | | | |
| 5 | Fungsional umum (Pengawasan Ketenagakerjaan) | Formulir SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | Januari 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Oktober 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | Penilaian Capaian SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | September 2016 | - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 | - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| Penilaian Prestasi Kerja | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 & Januari 2017 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota - Alasan Pejabat Penilai : Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provs Riau | | | |
| 6 | Penyuluh Kehutanan | Formulir SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | Januari 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Oktober 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Riau | |
| | | Penilaian Capaian SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | September 2016 | - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 | - Pejabat Penilai : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Riau | |
| Penilaian Prestasi Kerja | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 & Januari 2017 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Riau - Alasan Pejabat Penilai : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau | | | |
| 7 | Polisi Kehutanan | Formulir SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | Januari 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Oktober 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau | |
| | | Penilaian Capaian SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | September 2016 | - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 | - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau | |
| Penilaian Prestasi Kerja | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 & Januari 2017 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau - Alasan Pejabat Penilai : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau | | | |

| NO | JABATAN | JENIS DOKUMEN | PERIODE PENILAIAN | TANGGAL PENETAPAN | PENANDATANGAN | KET |
|----|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| 8 | Pengendali Ekosistem Hutan | Formulir SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | Januari 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Oktober 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau | |
| | | Penilaian Capaian SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | September 2016 | - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 | - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau | |
| | | Penilaian Prestasi Kerja | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 & Januari 2017 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau - Atasan Pejabat Penilai : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau | |
| 9 | Fungsional umum (Kehutanan) | Formulir SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | Januari 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Oktober 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kehutanan Provinsi Riau | |
| | | Penilaian Capaian SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | September 2016 | - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 | - Pejabat Penilai : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kehutanan Provinsi Riau | |
| | | Penilaian Prestasi Kerja | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 & Januari 2017 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kehutanan Provinsi Riau - Atasan Pejabat Penilai : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Riau | |
| 10 | Inspektur Ketenagalistrikan | Formulir SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | Januari 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota | Jika terjadi perubahan PERCA SOTK di Kabupaten/Kota yang berdampak pada tidak adanya lagi Dinas Pertambangan/ESDM di lingkungan Kabupaten/Kota maka penanda tanganan Formulir SKP dan Penilaian Capaian SKP periode Oktober 2016 s/d Desember 2016 dilaksanakan oleh Es.IV dan Es.III yang membidangi di Provinsi Riau |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Oktober 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau | |
| | | Penilaian Capaian SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | September 2016 | - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 | - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau | |
| | | Penilaian Prestasi Kerja | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 & Januari 2017 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau - Atasan Pejabat Penilai : Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau | |
| 11 | Penyelidik Bumi | Formulir SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | Januari 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Oktober 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau | |
| | | Penilaian Capaian SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | September 2016 | - Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 | - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau | |
| | | Penilaian Prestasi Kerja | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 & Januari 2017 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau - Atasan Pejabat Penilai : Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau | |

| NO | JABATAN | JENIS DOKUMEN | PERIODE PENILAIAN | TANGGAL PENETAPAN | PENANDATANGAN | KET |
|----|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|-----|
| 12 | Fungsional umum (ESDM) | Formulir SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | Januari 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Oktober 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau | |
| | | Penilaian Capaian SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | September 2016 | - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 | - Pejabat Penilai : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau | |
| | | Penilaian Prestasi Kerja | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 & Januari 2017 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau - Atasan Pejabat Penilai : Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau | |
| 13 | Polisi Khusus Perikanan | Formulir SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | Januari 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Oktober 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | Penilaian Capaian SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | September 2016 | - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 | - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | Penilaian Prestasi Kerja | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 & Januari 2017 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota - Atasan Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Provinsi Riau | |
| 14 | PPNS Perikanan | Formulir SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | Januari 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Oktober 2016 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | Penilaian Capaian SKP | Januari 2016 s/d September 2016 | September 2016 | - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | | Oktober 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 | - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota | |
| | | Penilaian Prestasi Kerja | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Desember 2016 & Januari 2017 | - PNS Ybs - Pejabat Penilai : Es.IV yang membidangi di Kab/Kota - Atasan Pejabat Penilai : Es.III yang membidangi di Provinsi Riau | |

DAFTAR NAMA PEJABAT PADA DINAS TERKAIT PENGALIHAN PERSONIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | NAMA / NIP | PANGKAT / GOLONGAN |
|----|---|--|--|---------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau | Kepala Dinas (Eselon II) | Dr. H. KAMSOL NIP. 19650314 199403 1 002 | Pembina Utama Muda / IV-c |
| | | Sekretaris (Eselon III) | ANASRI, SH NIP. 19591212 198101 1 002 | Pembina Tk.I / IV-b |
| | | Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Eselon III) | Drs. KHAILIL ANWAR NIP. 19630303 199101 1 001 | Pembina / IV-a |

| NO | UNIT KERJA | JABATAN | NAMA / NIP | PANGKAT / GOLONGAN |
|----|---|---|---|----------------------------|
| 2 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau | Kepala Dinas (Eselon II) | H. RASIDIN, SH NIP. 19590830 198003 1 004 | Pembina Utama Madya / IV-d |
| | | Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan (Eselon III) | YENITA RIZAL, SE MH NIP. 19570630 198603 2 001 | Pembina Tk.I / IV-b |
| | | Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan (Eselon IV) | Drs. ERWIN KUSUMA NIP. 19520924 198803 1 005 | Pembina Tk.I / IV-b |
| 3 | Dinas Kehutanan Provinsi Riau | Kepala Dinas (Eselon II) | Ir. FADRIZAL LABAY, MP NIP. 19500703 198803 1 001 | Pembina Utama Madya / IV-d |
| | | Sekretaris (Eselon III) | M. GENTA SOERIANTO, SH. MH NIP. 19550704 199103 1 005 | Pembina Tk.I / IV-b |
| | | Kepala Bidang Perlindungan Hutan (Eselon III) | ROSWANDI, SH NIP. 19630916 199803 1 001 | Pembina / IV-a |
| | | Kepala Sub Bagian Umum (Eselon IV) | BENI MASFAR, SE, MM NIP. 19720326 199203 1 004 | Penata / III-c |
| 4 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau | Kepala Dinas (Eselon II) | SYAHRIAL ABDI, AP, M Si NIP. 19751001 199503 1 001 | Pembina Utama Muda / IV-c |
| | | Sekretaris (Eselon III) | MARRADONA, S.STP, M.Si NIP. 19800407 199912 1 001 | Pembina / IV-a |
| | | Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (Eselon III) | Ir. YENDRA NIP. 19660330 199703 1 001 | Pembina / IV-a |
| | | Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Eselon III) | Ir. M. RIDWAN DERMAWAN NIP. 19630628 199803 1 001 | Penata Tk.I / III-d |
| | | Kepala Sub Bagian Umum (Eselon IV) | YENNITHA DEWI, SH, M.Si NIP. 19661020 199403 2 003 | Pembina / IV-a |
| 5 | Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau | Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan (Eselon III) | R. PERRY ANANTASA, S.Pi, M.MP NIP. 19691220 199703 1 004 | Pembina / IV-a |
| | | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan (Eselon IV) | SAPTA RAHMAWATI, S.Pi NIP. 19691012 199803 2 036 | Penata Tk.I / III-d |

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU,**



Drs. AsRIZAL, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 198702 1 001

Lampiran III

Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

Nomor : 800/BKP2D/3.2/XI/2016/3733

Tanggal : 22 November 2016

**PENILAIAN DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
BAGI PNS DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA YANG DIALIHKAN
KE PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

| NO | JABATAN | PERIODE PENILAIAN | PENILAIAN DUPAK | PENANDATANGAN BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT (BAPAK)/ HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT/TABULASI PENILAIAN ANGKA KREDIT | KET |
|----|-----------------------------|--------------------------------|---|---|--|
| 1 | Guru | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten/Kota | Ketua Tim Penilai Angka Kredit | Jika Tim Penilai Angka Kredit di Kabupaten/Kota belum terbentuk, maka pelaksanaan penilaian DUPAK dilaksanakan oleh Tim Penilai Provinsi |
| 3 | Pengawas Sekolah | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten/Kota | Ketua Tim Penilai Angka Kredit | |
| 4 | Pengawas Ketenagakerjaan | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten/Kota | Ketua Tim Penilai Angka Kredit | |
| 6 | Penyuluh Kehutanan | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten/Kota | Ketua Tim Penilai Angka Kredit | |
| 7 | Polisi Kehutanan | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten/Kota | Ketua Tim Penilai Angka Kredit | |
| 8 | Pengendali Ekosistem Hutan | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten/Kota | Ketua Tim Penilai Angka Kredit | |
| 7 | Inspektur Ketenagalistrikan | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten/Kota | Ketua Tim Penilai Angka Kredit | |
| 8 | Penyelidik Bumi | Januari 2016 s/d Desember 2016 | Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten/Kota | Ketua Tim Penilai Angka Kredit | |

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU,**



**Drs. ASRIZAL, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 198702 1 001**

Lampiran IV

Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

Nomor : 800/BKP2D/3.2/XI/2016/3733

Tanggal : 22 November 2016

**TIME SCHEDULE PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) TAHUN 2016,
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DAN PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT
PNS DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA YANG DIALIHKAN KE PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

| No | Tahapan | JADWAL PELAKSANAAN | KET |
|----|---|---------------------------------------|--|
| 1. | Tahapan Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Kota | | |
| 1 | Penyusunan dan Penetapan SKP | 28 November 2016 s/d 23 Desember 2016 | Formulir SKP dan Penilaian Capaian SKP yang sudah ditetapkan, diteruskan ke Dinas Terkait di Provinsi untuk Penetapan Penilaian Prestasi Kerja |
| 2 | Penyusunan dan Pengajuan DUPAK | 28 November 2016 s/d 16 Desember 2016 | Pejabat pengusul DUPAK adalah Kepala Sekolah atau Eselon III yang Membidangi Kepegawaian pada Dinas terkait di Kabupaten/Kota |
| 3 | Penilaian dan Penetapan BAPAK/HPAK/Tabulasi Penilaian | 19 Desember 2016 s/d 30 Desember 2016 | DUPAK dan BAPAK/HPAK/Tabulasi Penilaian yang sudah ditetapkan, diteruskan ke Dinas Terkait di Provinsi untuk Penetapan Angka Kredit |
| 4 | Penerimaan Usulan Berkas Kenaikan Pangkat | 28 November 2016 s/d 06 Januari 2017 | Berkas yang diterima minus Penilaian Prestasi Kerja dan Penetapan Angka Kredit 2016 (menyusul). Sementara untuk berkas lainnya harus lengkap. |

| No | Tahapan | JADWAL PELAKSANAAN | KET |
|----|---|--------------------------------------|---|
| 5 | Entry Usulan Kenaikan Pangkat | 09 Januari 2017 s/d 19 Januari 2017 | Proses entry menggunakan user provinsi. Untuk kenaikan pangkat reguler dan non reguler agar dibedakan nomor usulnya |
| 2. | Tahapan Pelaksanaan Kegiatan di Provinsi | | |
| 1 | Penetapan Penilaian Prestasi Kerja oleh Dinas Terkait di Provinsi | 26 Desember 2016 s/d 06 Januari 2017 | |
| 2 | Penetapan Angka Kredit oleh Dinas Terkait di Provinsi | 02 Januari 2017 s/d 20 Januari 2017 | |
| 3 | Memeriksa Berkas Usulan KP | 23 Januari 2017 s/d 27 Januari 2017 | |
| 4 | Mempersiapkan Nota Usul dan Surat Pengantar Kenaikan Pangkat | 23 Januari 2017 s/d 27 Januari 2017 | |
| 5 | Pemeriksaan Satu Atap dengan BKN | 30 Januari 2017 s/d 04 Februari 2017 | |
| 6 | Melengkapi Berkas Usulan KP (BKN) | 06 Februari 2017 s/d 03 Maret 2017 | |
| 7 | Mempersiapkan SK Kolektif Kenaikan Pangkat | 06 Maret 2017 s/d 22 Maret 2017 | |
| 8 | Mempersiapkan Pctikan Keputusan Kenaikan Pangkat | 23 Maret 2017 s/d 30 Maret 2017 | |

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU,**



**Drs. Asri ZAL, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 198702 1 001**